

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai pengendalian biaya terhadap penilaian kinerja karyawan dari pusat pertanggungjawaban DINHUBKOMINFO Jawa Tengah sudah diterapkan namun masih belum efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari kesimpulan sebagai berikut:

DINHUBKOMINFO Jawa Tengah secara umum telah memenuhi kriteria dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Struktur Organisasi DISHUBKOMINFO Jawa Tengah sudah baik, secara jelas dan tegas menggambarkan pembagian tugas, tanggungjawab serta garis wewenang yang dilaksanakan oleh atasan sampai bawahan. Hal ini jelas terlihat pada saat proses penyusunan anggaran dinas, seluruh unit ikut berpartisipasi dengan metode *bottom-up*.
- b. Dalam penyusunan anggaran sudah menggunakan azas partisipasi, yaitu setiap bidang diberi kewenangan untuk menyusun anggaran masing-masing bidang.
- c. Dalam penyusunan anggaran hanya digolongkan dengan biaya belanja langsung dan biaya tidak langsung, Tidak ada pembagian yang secara jelas memisahkan antara biaya yang terkendali dan biaya yang tidak terkendali.

- d. Pada biaya belanja langsung dan tidak langsung sudah di katakana *Favorable* antara lain : Biaya Langsung adalah Biaya Pemeliharaan Kendaraan, Biaya Makan dan Minum, sedang Biaya Tidak Langsung adalah Gaji dan Tunjangan dan Penambahan Penghasilan. Akan tetapi karena variansi anggaran pada bagian biaya jaminan milik daerah masih dibawah 90% yang seharusnya dalam setahun idealnya sudah bias mendapat variansi anggaran diatas 90% maka penyerapan biaya jaminan milik daerah kurang efektif.
- e. Memberikan *reward* atau *punishment* pada sub bagian keuangan belum efektif karena hanya dilihat dalam 1 bulan dilaporkan ke Kepala Dinas dan diteruskan ke Gubernur. *Reward* berupa bonus gaji dan *Punishment* berupa teguran dan peringatan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Kepala Dinas adalah untuk lebih meningkatkan konsep akuntansi pertanggungjawaban dalam mengambil kebijakan pada masa yang akan datang, yaitu:

- i. Untuk melakukan pengendalian biaya dan efesiensi biaya dengan lebih memperbanyak alokasi kegiatan untuk peningkatan kinerja DISHUBKOMINFO kepada masyarakat.
- ii. Serta memberikan hadiah bagi karyawan yang mampu mengendalikan dan mengefesiensikan biaya yang telah dianggarkan.

- iii. Di perlukan alat Econom yang untuk memantau realisasi kegiatan dan keuangan oleh Kepala Dinas dan Gubenur, sehingga apabila ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan bisa segera diantisipasi dan cepat mendapatkan solusinya.